

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu kata kunci yang sangat menentukan berhasil-tidaknya upaya mempertahankan persatuan bangsa Indonesia yang multikulturalisme adalah toleransi beragama. Meskipun telah banyak dirintis pelaksanaan dialog antarpemeluk umat beragama untuk menumbuhkan rasa saling pengertian diantara penganut umat beragama di Indonesia, masih tetap diperlukan langkah-langkah efektif agar hasilnya tetap optimal.

Berkaitan dengan upaya pengembangan sikap toleransi antar umat beragama di Indonesia, peran institusi pendidikan formal, termasuk institusi pendidikan yang dikelola oleh organisasi keagamaan seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Budha memiliki peranan yang sangat penting dalam menumbuhkan sikap toleransi. Oleh karena itu, sumbangan pemikiran mereka bagi pembentukan karakter anak didik yang religius, intelek, dan sekaligus nasionalis perlu dikembangkan.

Pendidikan dalam konteks pembangunan nasional pada hakikatnya mempunyai fungsi sebagai pemersatu bangsa, penyamaan kesempatan, dan pengembangan potensi diri. Hal ini senada dengan amanat pada Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa

yang bertabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokrasi serta bertanggung jawab. Kemudian dalam Pasal 12 ayat 1 (a) menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Sedangkan terkait dengan Pendidikan Agama pasal 30 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa:

1. Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang undangan;
2. Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama;
3. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal;
4. Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis;
5. Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah;

Selanjutnya Pasal 37 ayat 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 juga menyebutkan bahwa kurikulum dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, ketrampilan atau kejuruan dan muatan lokal. Kemudian ayat 3 terkait dengan ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Di era reformasi saat ini, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk peserta didik yang berkarakter. Dalam bentuknya yang ideal, PKn bertujuan mendidik siswa agar memiliki pengetahuan, sikap, keterampilan, dan pengalaman sehingga mereka bisa berpartisipasi secara aktif dan efektif di lingkungan mereka, baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, maupun sebagai warga negara. Untuk mencapai maksud hal tersebut, setidaknya dapat dilakukan melalui tiga pendekatan pengembangan, yaitu (1) *civic intelligence* (kecerdasan warga negara) dalam banyak aspek, seperti spiritual, rasional, emosional, dan sosial; (2) *civic responsibility*, yaitu tanggung jawab mereka sebagai warga Negara, seperti Guru pendidikan kewarganegaraan memiliki tanggung jawab sebagai warga negara untuk mendidik siswanya; dan (3) *civic participation*, berdasarkan hak dan tanggungjawab mereka baik sebagai individu maupun sebagai warga negara (Depdiknas, 2001: 3). Berdasarkan tiga pendekatan ini, profil warga negara ideal sebagai hasil dari pendidikan PKn diharapkan memiliki

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan prinsip dan konsep dasar demokrasi.

Selain itu Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) dan Pendidikan Agama yang diasumsikan sebagai kunci utama bagi pengembangan pendidikan karakter di sekolah kini dianggap tidak efektif dalam menginternalisasikan nilai-nilai toleransi, inklusif, dan anti kekerasan. Pengajaran oleh dua mata pelajaran ini tidak mampu memfilter berbagai infiltrasi sikap-sikap radikal, eksklusif, dan fanatik yang muncul dari berbagai faktor di luar sekolah. Hal tersebut senada dengan Presiden Megawati (Solo Pos, 18 Mei 2004) yang menyatakan bahwa pendidikan agama justru mengembangkan sikap fanatisme yang berlebihan sehingga toleransi beragama menjadi sangat rendah. Selain itu Muhammad Munadi Dosen STAIN Surakarta juga menyatakan bahwa pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan selama ini lebih mementingkan ranah kognitif yang dangkal, yaitu sebatas hafalan-hafalan teks tanpa ada pemaknaan realitas. Teks kering inilah yang menggiring para siswa hanya sekedar menjadi robot yang tidak bisa memaknai kehidupan riil di masyarakatnya. Mereka memberlakukan masyarakat seperti yang dibaca dalam teks, yang dilepaskan dari asbab al nuzul (sebab-sebab turun) maupun asbab al wurudl-nya (sebab-sebab diucapkan). Selain itu pendidikan norma lebih sering mementingkan bagaimana membuat jawaban-jawaban legitimasi dari pertanyaan yang sering muncul dalam sebuah kegiatan keagamaan, termasuk dalam pengajaran yang kental bermuatan etik, seperti seorang Guru yang mengajar hanya

mementingkan aspek kognitif, sedangkan aspek yang lain tidak dipertimbangkan. Guru mengajar hanya sesuai dengan teks yang mereka baca (Jurnal At Tarbawi STAIN Surakarta).

Begitu juga dengan Fajar Riza yang beranggapan bahwa menguatnya radikalisme keagamaan di sekolah disebabkan karena lemahnya penanaman nilai-nilai kemanusiaan dan karakter kebangsaan di dalam proses pembelajaran, serta menguatnya penetrasi kelompok radikal melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dengan cara pandangan keagamaan hitam putih. Selama ini pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan Agama masih banyak mengalami rintangan dalam menjalankan misinya yaitu membina masyarakat, khususnya peserta didik untuk menjadi insan yang mampu mencegah umat dari praktik-praktik kekerasan, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang didorong oleh sikap hidup konsumerisme, materialistik, dan hedonistik (Ismail SM dan Abdul Mukti, 2000: 146-147). Dengan demikian, materi Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Agama hendaklah benar-benar memperhatikan nilai-nilai pluralis, toleransi, humanis, egalitarian, aktual, transformatif, dan inklusif.

Beberapa kasus yang terjadi di masyarakat terkait dengan konflik agama antara lain yaitu:

1. Adanya bentrok di kampus Sekolah Tinggi Theologi Injil Arastamar (SETIA) dengan masyarakat setempat hanya karena kesalahpahaman akibat kecurigaan masyarakat setempat terhadap salah seorang mahasiswa SETIA yang dituduh mencuri, dan ketika telah diusut Polisi tidak ditemukan bukti apapun. Ditambah lagi adanya preman provokator yang melempari masjid dan masuk ke asrama putri kampus tersebut. Dan bisa ditebak, akhirnya meluas ke arah agama, ujung-ujungnya pemaksaan penutupan kampus tersebut oleh

masyarakat sekitar secara anarkis (Rarezakakakecil's. Cikeas. <http://groups.yahoo.com/group/CIKEAS/message>. Diakses tanggal 28 Mei 2012);

2. Anggota kelompok radikal yang menyerang SMA Katolik Saint Bellarminus di Jatibening, Bekasi, Jabar, pada tanggal 7 Mei 2010. Para demonstran mengklaim bahwa aksi mereka dipicu oleh sebuah tulisan anti-Islam di internet oleh salah seorang siswa sekolah tersebut. Sang siswa yang berusia 16 tahun saat ini menghadapi dakwaan penghujatan agama dengan tuntutan hukuman penjara maksimal dua tahun (Embassy of the United States Jakarta, Indonesia. <http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/id/news/key-reports/laporan-kebebasan-beragama.html>. Diakses tanggal 30 Maret 2013 );

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan menjelaskan bahwa pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran atau kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Adapun fungsi dan tujuan dari pendidikan agama berdasarkan Pasal 2 yaitu:

1. Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama;
2. Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;

Pengamalan terhadap nilai-nilai keagamaan di sekolah merupakan salah satu hal penting dalam mewujudkan sikap toleransi antarumat beragama, hal ini dikarenakan dengan adanya penanaman nilai-nilai tersebut maka akan dapat dikembangkan budaya toleransi beragama di sekolah. Selain hal tersebut, pendidikan dalam kaitanya dengan nilai-nilai toleransi idealnya mampu mencegah semangat *ekslusifisme* yang ada di sekolah. Oleh karena itu, perlu upaya membangun kesadaran siswa tentang toleransi beragama di sekolah melalui pendidikan agama. Di sini fungsi dan tanggung jawab guru tentu akan bertambah berat, karena guru harus memberikan penilaian yang tidak hanya sekedar berdasarkan hasil evaluasi, tetapi juga mengamati bagaimana perubahan perilaku siswa dalam bersosialisasi di lingkungan yang multikultur.

Yogyakarta merupakan kota pendidikan yang berkualitas, pariwisata berbasis budaya, dan pusat pelayanan jasa yang berbasis lingkungan. Hal tersebut telah dijabarkan ke dalam sembilan misi yogyakarta, di antaranya adalah :

1. mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya; serta
2. mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai;

Dengan kedua misi tersebut maka diharapkan masyarakat Kota Yogyakarta menjadi masyarakat yang religius disertai sikap toleransi antarumat beragama, dan meminimalkan permasalahan sosial melalui pendekatan basis komunitas dan adil gender pada 5 (lima) kelompok masyarakat, yaitu perempuan, anak, lansia, penduduk miskin, dan difabel,

diterapkannya nilai-nilai luhur yang berasal dari budaya dan agama dalam praktik kehidupan sehari-hari; meningkatnya kesadaran, kedisiplinan, dan peran serta masyarakat dalam menjaga dan menciptakan suasana Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu, dan damai; menurunnya intensitas dan frekuensi konflik sosial yang ditimbulkan karena isu SARA dan kesenjangan sosial ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang penanaman nilai toleransi antarsiswa SMP di Yogyakarta, hal ini dikarenakan siswa SMP merupakan remaja awal yang rentan terhadap pengaruh-pengaruh dari luar. Sesuai dengan pendapat Andi Mappire (1982 : 26) yang menyatakan bahwa remaja awal antara 13-17 tahun, dan masa remaja akhir antara 17-21 tahun. Selain hal tersebut alasan peneliti meneliti judul ini dikarenakan belum banyaknya penelitian yang meneliti tentang penanaman nilai toleransi di SMP serta adanya hambatan-hambatan guru dalam menerapkan dan mengembangkan nilai toleransi beragama yang dikarenakan faktor internal dan eksternal dari siswa itu sendiri. Adapun faktor internal tersebut antara lain berupa motivasi belajar, intelegensi, kebiasaan, dan rasa percaya diri siswa. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu faktor yang terdapat di luar siswa, seperti; guru sebagai pembina kegiatan belajar, startegi pembelajaran, sarana dan prasarana, kurikulum serta lingkungan siswa.



## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan terkait dengan toleransi antar umat beragama di Yogyakarta sebagai berikut:

1. Belum jelasnya penanaman nilai toleransi untuk kalangan umat beragama di Sekolah Menengah Pertama (SMP).
2. Adanya hambatan-hambatan dalam mengembangkan dan menerapkan nilai toleransi antarumat beragama di sekolah.
3. Masih adanya kasus pelanggaran terhadap toleransi antarumat beragama di berbagai kalangan pelajar.
4. Belum jelasnya penerapan pembelajaran nilai toleransi di sekolah-sekolah SMP.
5. Kurangnya pemahaman guru terkait dengan pentingnya penanaman nilai toleransi antarumat beragama terhadap peserta didik.

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti tidak akan meneliti permasalahan secara keseluruhan terkait dengan penanaman nilai toleransi untuk kalangan umat beragaman di SMP di Yogyakarta, karena keterbatasan waktu. Agar penelitian dapat lebih efektif dan efisien, maka peneliti hanya membatasi masalah mengenai:

1. Belum optimalnya penanaman nilai toleransi antarumat beragama di kalangan siswa SMP di Yogyakarta dan materi-materi yang diterapkan oleh SMP untuk mengkoordinir nilai-nilai toleransi antarumat beragama di kalangan siswa SMP di Yogyakarta.
2. Adanya hambatan-hambatan dalam menangani permasalahan terkait dengan nilai toleransi antarumat beragama pada siswa SMP di Yogyakarta.
3. Belum adanya upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penerapan nilai toleransi antarumat beragama di kalangan siswa SMP di Yogyakarta.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, batasan masalah dan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penanaman nilai toleransi antarumat beragama di kalangan siswa SMP di Yogyakarta dan materi-materi apa sajakah yang diterapkan oleh SMP untuk mengkoordinasi nilai-nilai toleransi antarumat beragama di kalangan siswa SMP di Yogyakarta?
2. Hambatan-hambatan apa sajakah yang dihadapi oleh SMP dalam penerapan nilai toleransi antarumat beragama di kalangan siswa SMP di Yogyakarta?

3. Upaya apa sajakah yang dilakukan oleh sekolah, dalam hal ini kepala sekolah untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penerapan nilai toleransi antarumat beragama di kalangan siswa SMP di Yogyakarta?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penanaman nilai toleransi antarumat beragama di kalangan siswa SMP di Yogyakarta dan materi-materi apa saja yang diterapkan oleh SMP untuk mengkoordinasi nilai-nilai toleransi antarumat beragama.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa sajakah yang dihadapi oleh SMP dalam penerapan nilai toleransi antarumat beragama di kalangan siswa SMP di Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui upaya apa sajakah yang dilakukan oleh sekolah, dalam hal ini kepala sekolah untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penerapan nilai toleransi antar umat beragama di kalangan siswa SMP di Yogyakarta.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun praktis.

### 1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan, terutama terkait dengan nilai toleransi.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Peneliti dan Mahasiswa

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang penanaman nilai toleransi di sekolah.

#### b. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi lembaga pendidikan khususnya SMP agar penanaman nilai toleransi di sekolah tersebut meningkat.

#### c. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan kajian bagi mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta pada umumnya dan mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan pada khususnya.

## **G. Batasan Istilah**

### 1. Penanaman Nilai

Penanaman nilai adalah proses (perbuatan, cara) menanamkan. Jadi yang dimaksud penanaman di sini adalah bagaimana usaha seseorang atau seorang guru menanamkan suatu nilai kepada anak didiknya yang dilandasi oleh pemahaman terhadap berbagai kondisi pembelajaran yang

berbeda-beda (<http://id.wikipedia.org/wiki/Toleransi>. Diakses tanggal 29 ei 2012).

## 2. Toleransi Beragama

Menurut Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia toleransi adalah sifat atau sikap toleran, batas ukur untuk penambahan atau, pengurangan yg masih diperbolehkan, maupun penyimpangan yg masih dapat diterima dalam pengukuran kerja (2008: 1538). Sedangkan pengertian agama yaitu ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) kepada Tuhan yang Mahakuasa, tata peribadatan, dan tata kaidah yg bertalian dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya dengan kepercayaan itu, seperti Islam, Hindu, Budha, Kristen, dan Katolik (2008: 18).

## 3. SMP (Sekolah Menengah Pertama)

SMP (Sekolah Menengah Pertama) merupakan jenjang pendidikan dasar formal di Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan sekolah dasar (SD) atau yang sederajat. Sekolah Menengah Pertama dilaksanakan dalam kurun waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Siswa kelas 9 diwajibkan mengikuti Ujian Nasional yang mempengaruhi kelulusan atau tidaknya siswa. Dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa “Setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”.